

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, berikut kesimpulan dari aspek-aspek Kapabilitas BPBD dalam upaya penanggulangan banjir rob di pesisir utara Kota Pekalongan:

1. Ditinjau dari enam dimensi kapabilitas Beverly Cigler, kapabilitas BPBD Kota Pekalongan secara umum sudah terstruktur namun belum optimal.
 - a. Kapabilitas teknis, BPBD telah memiliki sistem manajemen logistik melalui SOP dan kerja sama vendor lokal, serta sistem peringatan dini berbasis IoT (ROB-EWS, FFWS, dan SIG multifase) dalam platform Smart City, tetapi kapabilitas ini masih bersifat adaptif karena bergantung pada konsultan eksternal, rentan kerusakan akibat korosi, dan menghadapi tantangan pembaruan data topografi akibat penurunan muka tanah.
 - b. Kapabilitas sumber daya manusia, pembagian tugas sudah formal melalui tiga Kasi, namun mayoritas personil berpendidikan SLTA dengan tenaga teknis spesifik yang masih terbatas, sehingga kapabilitas ini formal tetapi substansinya masih parsial.
 - c. Kapabilitas finansial, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir rob jangka panjang masih jauh dari memadai, cenderung reaktif, dan bergantung pada pemerintah pusat, sehingga BPBD berupaya mencari inisiatif pendanaan lain melalui kerja sama dengan mitra eksternal guna menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas dan tujuan strategis.
 - d. Kapabilitas kelembagaan, struktur dan komunikasi sudah matang secara multilevel dan multisektor, namun masih terkendala ego sektoral dan koordinasi lintas wilayah.
 - e. Kapabilitas kebijakan, regulasi sudah tersusun komprehensif namun implementasinya terbatas oleh status kelembagaan “Badan” yang membatasi kewenangan eksekusi.

- f. Kapabilitas kepemimpinan, Kalakhar BPBD cukup adaptif dan koordinatif di level operasional, tetapi pada level strategis masih terkonstrain karena penetapan status tanggap darurat berada di tangan Wali Kota.
2. Faktor penghambat kapabilitas BPBD yang di ukur melalui Toeri Organizational Inertia Hannan and Freeman (1984), terdiri atas tiga kategori inertia yang secara persisten membatasi efektivitas BPBD.
 - a. Aspek *structural inertia*, fragmentasi kewenangan antarinstansi, keterbatasan anggaran, birokrasi pencairan dana darurat yang berjenjang, serta status kelembagaan “Badan” dengan otoritas eksekusi terbatas menghambat kecepatan dan kualitas respons di setiap fase penanggulangan bencana.
 - b. Aspek *cultural inertia*, kesenjangan antara teknologi yang tersedia dengan praktik operasional sehari-hari, pola kerja yang masih reaktif-pasif terhadap peringatan BMKG, serta ketergantungan pada alat konvensional seperti pompa yang kurang efektif saat puncak bencana mencerminkan belum terjadinya transformasi budaya kerja yang dibutuhkan.
 - c. Aspek *cognitive inertia*, kebijakan masih memandang rob sebagai peristiwa musiman yang bisa ditangani dengan instrumen lama, bukan sebagai ancaman struktural kronis, sehingga strategi penanganannya stagnan pada pendekatan fisik-struktural konvensional. Ketiga inersia ini saling memperkuat dan menjadi akar belum optimalnya kapabilitas BPBD, sehingga diperlukan penguatan simultan di seluruh dimensi kapabilitas sekaligus pembaruan paradigma penanganan bencana secara menyeluruh.

5.2.SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, berikut langkah-langkah strategis yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan kapabilitas BPBD dalam upaya penanggulangan banjir rob di pesisir utara Kota Pekalongan:

1. Menyusun SOP pendelegasian kewenangan darurat dengan plafon anggaran tertentu kepada Kalakhar, agar tidak seluruh keputusan harus menunggu rantai persetujuan berjenjang.
2. Membuat nota kesepahaman/SOP bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bapperida sebelum musim rob, agar jalur pencairan dana darurat sudah disepakati lebih awal.
3. Menyusun kajian beban kerja secara mandiri sebagai dasar advokasi peningkatan status kelembagaan BPBD menjadi "Dinas".
4. Mengagendakan evaluasi kesiapsiagaan bulanan di luar musim rob, tidak hanya bereaksi setelah kejadian.
5. Merevisi Renstra maupun Renja BPBD agar secara eksplisit mendefinisikan rob sebagai ancaman struktural kronis, bukan bencana musiman.
6. Mengadakan paparan berkala dengan OPD lainnya mengenai data terkini penurunan tanah dan kenaikan muka laut bagi pengambil keputusan internal.
7. Menambahkan pertanyaan reflektif wajib dalam after-action review untuk menilai kecukupan pendekatan konvensional (pompa/sandbag).
8. Melakukan studi banding ke daerah lain dengan ancaman serupa yang telah menerapkan strategi transformatif seperti relokasi terencana.

Dengan implementasi kedelapan rekomendasi tersebut, mulai dari penguatan kewenangan struktural melalui pendelegasian dan kesepakatan lintas-instansi, transformasi budaya kerja dari reaktif menjadi proaktif, hingga reorientasi cara pandang organisasi terhadap rob sebagai ancaman struktural kronis, ketiga faktor penghambat kapabilitas BPBD Kota Pekalongan

diharapkan dapat diminimalisasi secara bertahap, sehingga kapabilitas BPBD dapat berkembang menjadi lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana banjir rob jangka panjang.